



BUPATI ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 24 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ENDE  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029;

Mengingat...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 ( lima ) Tahun terhitung mulai Tahun 2025 – 2029.
4. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renja Dinas adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen Rencana 5 Tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor – faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran , strategi serta evaluasi Kinerja Dinas.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Strategi Perangkat Daerah untuk Satu (1) tahun.
7. Daerah adalah Kabupaten Ende.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

9. Bupati...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

9. Bupati adalah Bupati Ende.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ende.
12. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.

## BAB II

### KETENTUAN PENYUSUNAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

#### Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
  - a. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;
  - b. Hasil evaluasi capaian indikator Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2019-2024;
  - c. Isu – isu strategis yang berkembang;
  - d. Kebijakan nasional;
  - e. Regulasi yang berlaku.

(4) Penentuan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

- (4) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas memperhatikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2026 – 2029 dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
- (5) Penentuan program dalam Renstra Dinas memperhatikan :
- a. Penyelarasan program prioritas nasional;
  - b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Renstra melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan Tahun 2024;
  - c. Evaluasi kontribusi keluaran output dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam pencapaian hasil;
  - d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - e. Kebijakan nasional;
  - f. Regulasi yang berlaku dan
  - g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan pembangunan daerah.

### Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Tahun 2025-2029 digunakan sebagai instrument pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta program kegiatan Dinas yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Ende Tahun 2025-2029;
  - (2) Sistematika Renstra Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. BAB I Pendahuluan
  - b. BAB II...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

- b. BAB II Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis
- c. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
- d. BAB IV Program Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- e. BAB V Penutup

(3) Ketentuan isi dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Tahun 2025-2029 dapat dilakukan perubahan apabila :
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan
  - d. perubahan Renstra Tahun 2025-2029 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Perubahan Renstra berpedoman pada perubahan RPD

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Akhir Renstra Dinas disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.

(3) Kepala...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

- (3) Kepala Dinas menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang Renstra Dinas kepada semua Pejabat Pengawas, Pejabat Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas.

## BAB IV

### PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN

#### Bagian Kesatu

##### Pengendalian

###### Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- kebijakan perencanaan; dan
  - pelaksanaan

###### Pasal 8

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas mengetahui Sekretaris Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Evaluasi

###### Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan.

###### Pasal 10...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

## Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
  - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi dalam rangka pencapaian Renstra

## Bagian Ketiga

### Perubahan

#### Pasal 11

- (1) Renstra Dinas dapat diubah dalam hal:
  - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
  - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra Dinas masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang sesuai kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

BAB VI...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal 29 September 2025



Diundangkan di Ende

pada tanggal 30 September 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 14

#### Paraf Koordinasi

Kepala Dinas PPKB	
Kepala Bagian Hukum	

#### Paraf Hierarki

Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala Dinas PPKB	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ENDE  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	9
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	15
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.1.4. Kelompok Sasaran pelayanan perangkat daerah.....	28
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	29
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.2.2. Isu Strategis.....	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
3.1. Tujuan.....	33
3.2. Sasaran.....	34
3.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	39
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	41
4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	88
4.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah.....	88
BAB V PENUTUP.....	89

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Klasifikasi ASN Dinas PPKB Kab. Ende Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.2.	Klasifikasi ASN Dinas PPKB Kab. Ende Berdasarkan Tingkat Pendidikan Golongan.....	16
Tabel 2.3.	Sarana dan Prasarana Dinas PPKB Kab. Ende.....	16
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB Kab. Ende Tahun 2020-2024.....	19
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Kab. Ende.....	37
Tabel 3.2.	Penahapan Rencana Strategis DPPKB Kab. Ende.....	38
Tabel 4.1.	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda.....	42
Tabel 4.2.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	87
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Utama DPPKB Kab. Ende.....	88
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Kunci DPPKB Kab. Ende.....	88

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	3
Gambar 2. 1	Struktur Organisasi Dinas PPKB Kab. Ende.....	15
Gambar 2. 2	Tren Pencapaian TFR Periode Tahun 2020-2024.....	20
Gambar 2. 3	Tren Pencapaian CPR Periode Tahun 2020-2024.....	22
Gambar 2. 4	Tren Pencapaian Unmeet Need Periode Tahun 2020-2024.....	23
Gambar 2. 5	Tren Pencapaian Implementasi Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk Tahun 2020-2024.....	24
Gambar 2. 6	Tren Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Periode Tahun 2020-2024.....	25
Gambar 2. 7	Tren Pencapaian Menurunnya Tingkat Putus Pakai Pemakaian Kontrasepsi (Drop Out/DO) Periode 2020-2024.....	26
Gambar 2. 8	Tren Pencapaian Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan Periode 2020-2024.....	27
Gambar 2. 9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PPKB Kab. Ende.....	27
Gambar 3. 1	Konsep Indeks Pembangunan Keluarga.....	33
Gambar 3. 2	Target Indeks Pembangunan Keluarga 2025-2030.....	34
Gambar 3. 3	Target Total Fertility Rate/ TFR Tahun 2025-2030.....	35

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 mengamanatkan bahwa Bupati/ Walikota memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2025 – 2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan Penyusunan RPJMD Kabupaten/ Kota.

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PPKB) Kabupaten Ende sebagai salah satu perangkat daerah yang ada di Kabupaten Ende dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029 juga mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara



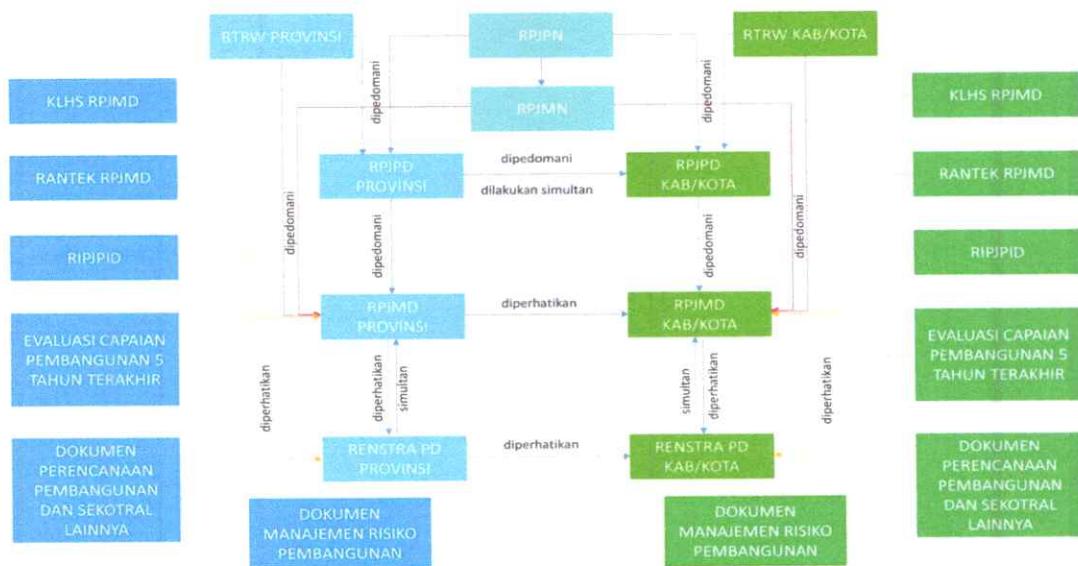
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029.

Renstra Dinas PPKB Kabupaten Ende tersebut menyajikan agenda utama perencanaan pembagunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum tertangani pada periode sebelumnya. Renstra Dinas PPKB Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 juga menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas PPKB Kabupaten Ende.

Proses penyusunan Renstra Dinas PPKB Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya digambarkan pada gambar di bawah ini :



**Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya**



## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080),
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemeritah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
  16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende 2011 – 2031;



19. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Ende Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende adalah :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana selama kurun waktu tahun



- 2025 - 2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dalam mendukung tujuan Bupati Ende.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana kurun waktu tahun 2025 - 2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.
  - c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

*BAB I PENDAHULUAN*, memuat tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

*BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH*, memuat informasi tentang tugas, fungsi struktur perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

*BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN* memuat tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

*BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN* memuat tentang uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.



*BAB V PENUTUP*, memuat kesimpulan penting substansial, dan kaidah pelaksanaan.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

##### 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende ditetapkan melalui Peraturan Bupati Ende Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende.

Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende adalah membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga daerah kabupaten.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
3. Pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
6. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana.



7. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
8. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan kesetaraan keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Ende Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende sebagai berikut :

#### *Sekretariat*

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan, perpendaharaan, akuntasi dan verifikasi;
- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanganan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat membawahi dua sub bagian :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkepan, rumah tangga dan



pengelolaan barang milik daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan persuratan;
- b. Pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kerumahtanganan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- g. Pengelolaan kehumasan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksanaan, verifikasi anggaran dan pembukuan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- b. Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- c. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- d. Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
- e. Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- f. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

#### *Bidang Pengendalian Penduduk*

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebiaakan teknis di bidang pengendalian penduduk. Dalam menjalankan tugasnya bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;



- c. Pelaksanaan kebijakan daerah bidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk daerah;
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk; dan
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Bidang Keluarga Berencana*

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang keluarga berencana daerah kabupaten. Dalam menjalankan tugasnya, bidang keluarga berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana daerah;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*

Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan



kesejahteraan keluarga. Dalam melaksanakan tugasnya bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga balita;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang bina keluarga lansia dan rentan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pemantauan dan evaluasi bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga; dan
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

#### *Bidang Penyuluhan dan Penggerakan*

Bidang Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan penggerakan. Dalam menjalankan tugasnya bidang penyuluhan dan penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang penyuluhan dan penggerakan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan keluarga berencana/ petugas lapangan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan;



- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang penyuluhan, advokasi dan penggerakan.

#### *Kelompok Jabatan Fungsional*

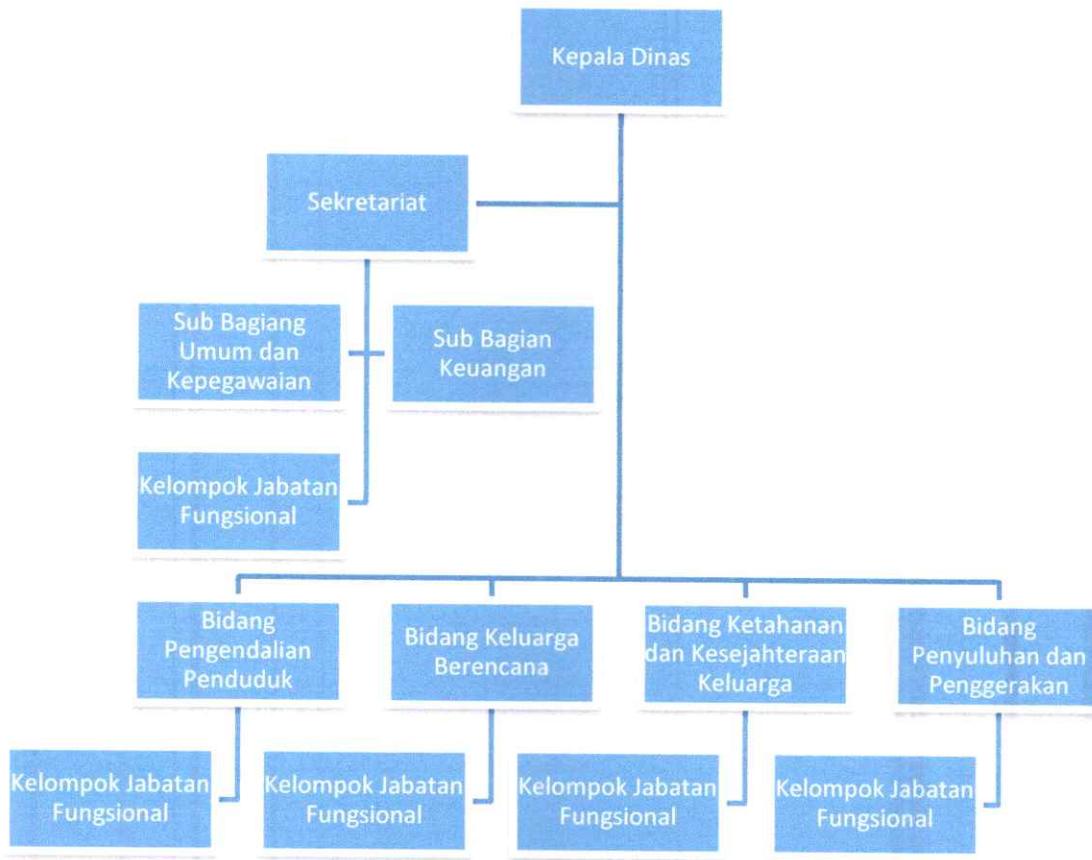
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, yang membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengendalian Penduduk.
4. Bidang Keluarga Berencana.
5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Bidang Penyuluhan dan Penggerakan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Ende



### 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende kondisi sampai dengan bulan April 2025 sebanyak 26 orang ASN (6 laki-laki dan 20 perempuan). Dilihat dari tingkat pendidikannya, jumlah pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 2 orang, pendidikan S1 sebanyak 18 orang, pendidikan D3 sebanyak 2 orang, pendidikan SLTA sebanyak 4 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Klasifikasi ASN Dinas PPKB Kab. Ende  
Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	IV	-	5	5
2.	III	6	14	20
3.	II	-	1	1
<b>Total</b>		<b>8</b>	<b>21</b>	<b>29</b>



Sumber data kepegawaian Mei 2025

Tabel 2.2 Klasifikasi ASN Dinas PPKB Kab. Ende  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Strata 2	-	2	2
2.	Strata 1	4	14	18
3.	Diploma 3	1	1	2
4.	Sekolah Menengah Atas	1	3	4
	Total	6	20	26

Sumber data kepegawaian Mei 2025

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas PPPKB Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Sarana dan Prasarana Dinas PPKB Kab. Ende

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. III	512 M2	Baik -
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1500 M2	Baik -
3	Station Wagon	3	Baik (1) Rusak Berat (2)
4	Micro Bus	2	Baik -
5	Pick Up	1	Baik -
6	Sepeda Motor	101	Baik (45) Rusak Berat (56)
7	Lemari Penyimpanan	4	Baik -
8	Alat Pembuat Pelet/Makanan Ternak	14	Baik -
9	Mesin Stensil Manual Folio	1	- Rusak Berat
10	Lemari Besi	1	Baik -
11	Lemari Kayu	18	Baik -
12	Rak Besi	1	Baik -
13	Rak Kayu	19	Baik -
14	Filing Cabinet Besi	5	Baik -
15	Brandkas	1	- Rusak Berat
16	Papan Visual/Papan Nama	4	Baik -
17	White Board	8	Baik -
18	Overhead Projector	1	- Rusak Berat
19	Alat Sidik Jari	1	Baik -
20	Papan Nama Instansi	9	Baik -
21	Meja 1/2 Biro	50	Baik (49) Rusak Berat (1)
22	Kursi Putar	3	Baik -
23	Kursi Biasa	130	Baik -
24	Meja Komputer	2	- Rusak Berat
25	Sofa	1	Baik -



No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
26	Meubler Lainnya	15	Baik -
27	Jam Mekanis	1	- Rusak Berat
28	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Baik Rusak Berat
29	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik -
30	AC Split	5	Baik -
31	Kipas Angin	18	Baik -
32	Exhause Fan	12	Baik -
33	Treng Air/Tandon Air	1	Baik -
34	Loud Speaker	1	Baik -
35	Wireless	24	Baik (21) Rusak Berat (3)
36	Megaphone	3	- Rusak Berat
37	Microphone	2	- Rusak Berat
38	Microphone Floor Stand	1	- Rusak Berat
39	Unit Power Supply	2	Baik -
40	Camera Video	1	- Rusak Berat
42	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik -
43	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik -
44	Tangga Aluminium	2	Baik -
45	Alat Pemadam/Portable	1	Baik -
46	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik -
47	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	7	Baik -
48	Kursi kerja Pejabat Eselon III	3	Baik -
49	Kursi Kerja Pegawai non Struktural	1	Baik -
50	Kursi Tamu di Depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2	Baik -
51	Buffet Kayu	1	Baik -
52	Compact Disc Player	2	Baik -
53	Slide Projector	2	- Rusak Berat
54	Layar Film/Projector	15	Baik (14) Rusak Berat (1)
56	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	Baik -
57	Alat kedokteran umum lainnya	1	Baik -
58	Alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	246	Baik -
59	Kursi Kayu	60	Baik (56) Rusak berat (4)
60	Meja Rapat	13	Baik (10) Rusak berat (3)
61	Alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	68	Baik -
62	Alat kesehatan umum lainnya	4	Baik -
63	Distiling Apparatus	3	Baik -
64	Alat laboratorium lain lainnya (dst)	2	Baik -
65	P.C Unit	43	Baik (37) Rusak berat (6)
66	Laptop	4	Baik (3) Rusak berat (1)
68	Printer	50	Baik (39) Rusak berat (11)



No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
69	Scanner	2	Baik -
70	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	Baik (4) Rusak berat (8)
71	Modem	35	Baik (34) Rusak berat (1)
72	Bangunan Gedung Kantor Permanen	22	Baik -
73	Bangunan Gedung kantor lain-lain	1	Baik -
74	Bangunan Gudang Tertutup Lainnya	1	Baik -
75	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	Baik -
76	Jalan Khusus Kompleks	1	Baik -
77	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	5	Baik -

Sumber data : Buku Inventaris Gabungan Desember 2024

#### 2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dapat diukur dari pencapaian indikator sasaran dan program yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019 – 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PPKB Kabupaten Ende tahun 2019 – 2024. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran dan program, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel.2.4) dibawah ini :



**Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende**  
**Tahun 2020 – 2024**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian tahun Ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,5	2,46	2,43	2,40	2,40	2,7	2,3	2,59	2,82	2,86	0,93	1,07	0,94	0,85	0,84
2.	Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)	64,10 %	66,67 %	69,21 %	71,71 %	74,14 %	60,72 %	52,85 %	37,16%	39,21%	40,35%	0,95	0,79	0,54	0,54	0,54
3.	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	33,34 %	24,92 %	21,71 %	16,71 %	32%	25,50 %	11,17 %	55,12%	38,09%	26,14%	1,31	0,82	0,38	0,43	0,43
4.	Meningkatnya implementasi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk	-	-	84,5 %	85,5 %	86,30 %	-	-	50%	56,25%	46,88%	-	-	0,59	0,66	0,54
5.	Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	43,93 %	47,50 %	44,11 %	45,31 %	46,51 %	41,75 %	46,64 %	45,37%	45,31 %	39,04%	0,95	0,98	1,03	1	0,84
6.	Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO)	-	2,5%	15,5 %	10,5 %	5,5%	-	20,50 %	67,80%	-13,48 %	9,13%	-	0,1	0,23	1,28	0,60
7.	Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan	21	21	25	24	23	29	28	26	27	32	0,72	0,75	0,96	0,89	0,72

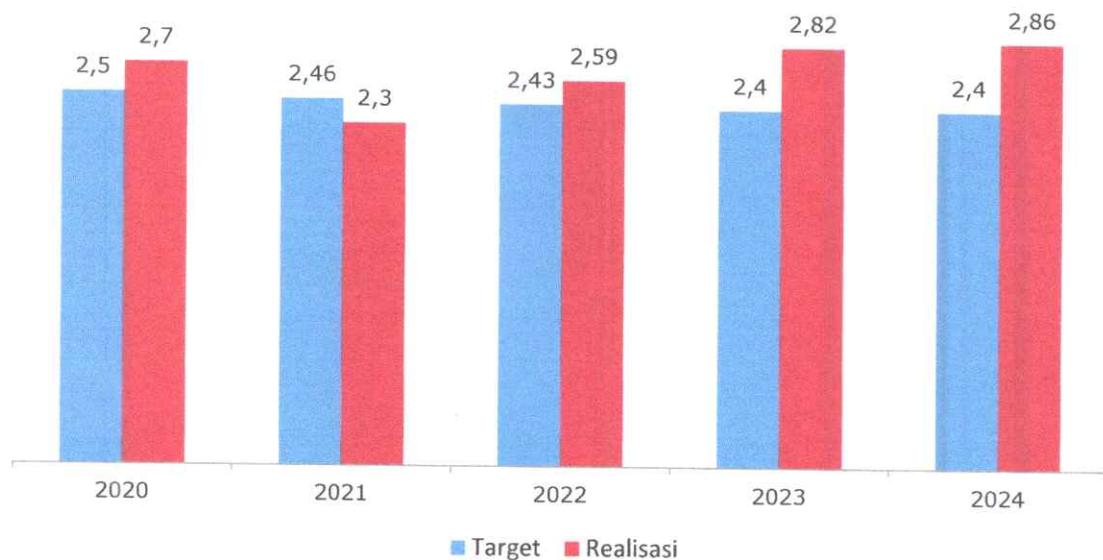


Dari tabel pencapaian kinerja pelayanan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka Kelahiran Total (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Perhitungan TFR dilakukan dengan menggunakan data dari Penyuluhan Keluarga Berencana di setiap kecamatan, data dari Dinas Kesehatan dan data dari Pemutakhiran PK. Hasil perhitungan menunjukkan capaian indikator TFR untuk Kabupaten Ende pada Tahun 2024 adalah 2,86 anak perwanita. Apabila dibandingkan dengan target TFR Tahun 2024 sebesar 2,4 maka persentase realisasi capaian adalah 83,92% yang artinya status capaian TFR berkategori baik. Perkembangan pencapaian TFR selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.2 Tren Pencapaian TFR Periode Tahun 2020 – 2024



Gambar 2.1 menunjukkan adanya perbandingan tren TFR pada kurun waktu 2020 – 2024. Angka TFR terus meningkat dari 2,7



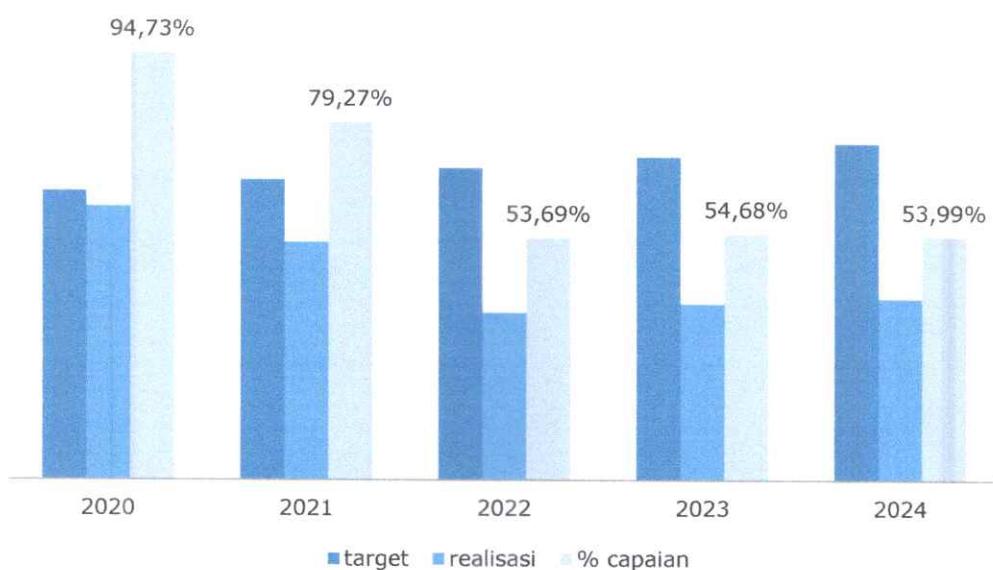
anak per wanita pada tahun 2020 menjadi 2,86 anak per wanita pada tahun 2024. Sempat menunjukan tren baik antara tahun 2020 (2,7 anak perwanita) sampai tahun 2021 (2,3 anak perwanita). Angka TFR pada akhir Renstra 2019-2024 ini ternyata belum mencapai target 2,40.

## 2. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

Persentase pemakaian kontrasepsi modern adalah proporsi wanita kawin usia 15-49 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Metode kontrasepsi meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/ steril wanita/ tubektomi, Metode Operasi Pria (MOP)/ steril pria/ vasektomi, IUD/ spiral/ Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implant/ susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL). Perhitungan CPR dilakukan dengan menggunakan data dari aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan pemutakhiran PK. Dari hasil perhitungan menunjukan bahwa apabila dibandingkan dengan target maka realisasi CPR tahun 2024 adalah 53,99 % dengan kategori sangat kurang. Perkembangan pencapaian CPR selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.3 Tren Pencapaian CPR Periode Tahun 2020 – 2024



Gambar diatas menunjukan bahwa terjadi penurunan capaian CPR sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tantangan dalam upaya pencapaiannya antara lain masih adanya mitos atau rumor negatif pada masyarakat terkait penggunaan kontrasepsi dalam upaya pencapaiannya antara lain masih adanya mitos atau rumor negatif pada masyarakat terkait penggunaan kontrasepsi, belum semua tenaga kesehatan (dokter dan bidan) mendapatkan pelatihan CTU IUD/ Implant dan memiliki sertifikat kompetensi, belum idealnya rasio tenaga PKB dengan jumlah desa saat ini (1:8 desa) dengan kondisi ideal (1:2 desa) sehingga pelaksanaan komunikasi, edukasi dan informasi (KIE) kurang optimal.

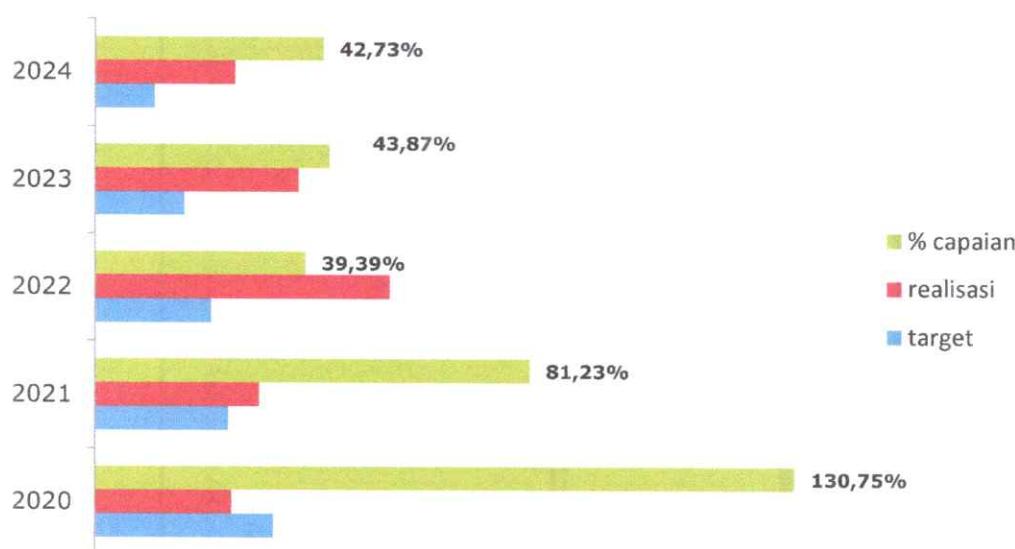
3. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need).

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) adalah persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Persentase unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi bernilai 0-100, dengan

arti semakin rendah nilainya maka semakin baik penyelenggaraan program Keluarga Berencana, maksudnya adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Hasil perhitungan persentase unmeet need di Kabupaten Ende pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,43% dengan kategori kurang. Perkembangan pencapaian Unmeet Need selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.4 Tren Pencapaian Unmeet Need Periode 2020 - 2024



Gambar diatas menunjukkan pencapaian Unmeet Need yang terus menurun sejak Tahun 2020 sampai dengan 2024. Faktor kegagalan/ penghambat pencapaian ini antara lain : hambatan spesifik dalam penggunaan kontrasepsi yaitu masih terdapat masyarakat yang belum terinformasi tentang metode KB dan terdapat muatan isi pesan yang kurang tepat sasaran, hambatan akses masyarakat untuk ke fasilitas pelayanan kesehatan dan masih belum optimalnya pemberian informasi kepada masyarakat tentang fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan KB.



4. Meningkatnya Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk.
- Implementasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan pengendalian penduduk mulai diukur padatahun 2022 karena indikator ini ditetapkan pada Perubahan Rencana Strategis 2019 - 2024. Perhitungan indikator ini pada tahun 2024 adalah 54,32% dengan kategori kurang. Tren Pencapaian mengalami penurunan dari 59,14% pada tahun 2022 menjadi 54,32% pada tahun 2024.

Gambar 2.5 Tren Pencapaian Implementasi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan Pengendalian Penduduk Tahun 2022-2024

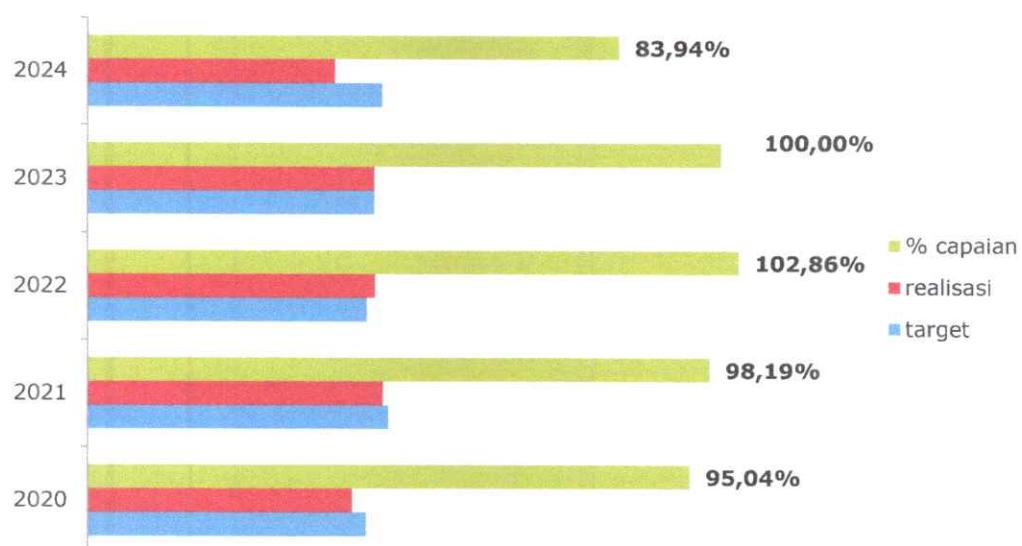


5. Meningkatnya Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terhadap seluruh PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah (secara hukum, agama atau adat) dimana istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun. Metode kontrasepsi jangka panjang meliputi Metode Operasi Wanita (MOW)/steril wanita,

Metode Operasi Pria (MOP)/steril pria, IUD/spiral/ Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), dan implan/susuk. Perhitungan Persentase MKJP dilakukan dengan menggunakan data dari aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) dan pemutakhiran PK. Hasil perhitungan Persentase MKJP Tahun 2024 adalah 39,04%. Perkembangan pencapaian Persentase MKJP tahun 2020 sampai dengan 2024 digambarkan di bawah ini.

Gambar 2.6 Tren Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  
Periode Tahun 2020-2024



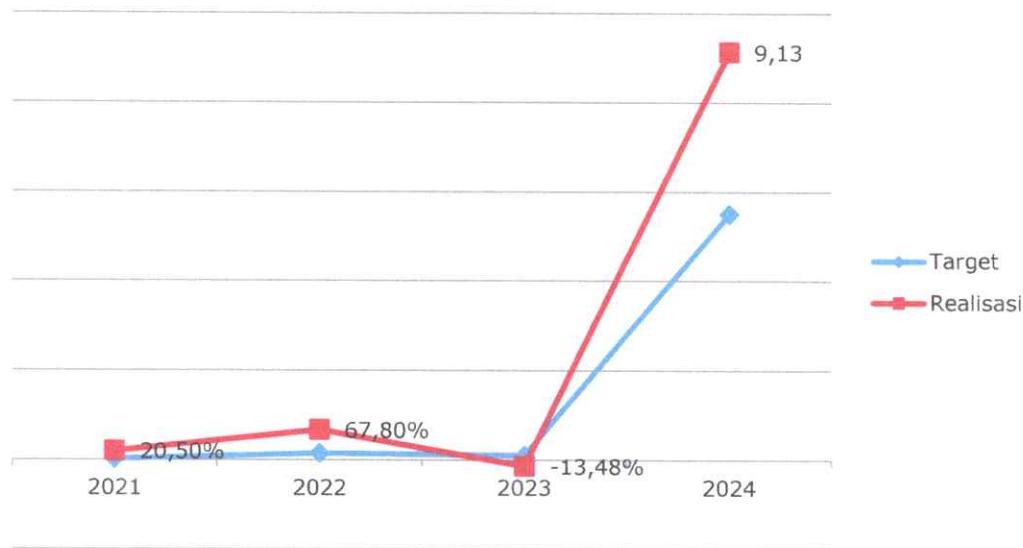
6. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Pemakaian Kontrasepsi (Drop Out/ DO).

Persentasi tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi merupakan persentasi PUS yang mengalami putus pakai kontrasepsi dibandingkan dengan jumlah PUS yang ada. Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi bernilai 0-100, dengan arti semakin rendah nilainya maka semakin baik. Pencapaiannya selama tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, 20,50% pada tahun 2021, menjadi 67,80% pada



tahun 2022, menjadi - 13,48% pada tahun 2023 dan menjadi 9,13% pada tahun 2024.

Gambar 2.7 Tren Pencapaian Menurunnya tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop Out/ DO) Periode 2021 – 2024



#### 7. Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan.

Rata-rata usia kawin pertama perempuan didefinisikan sebagai rata-rata usia saat pertama kali kawin pada wanita usia subur (15 – 49 tahun) yang berstatus kawin atau pernah kawin.

Pencapaian rata-rata usia kawin pertama perempuan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir juga mengalami fluktuasi, menurun dari tahun 2020 ke tahun 2022 kembali meningkat di tahun 2023, selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

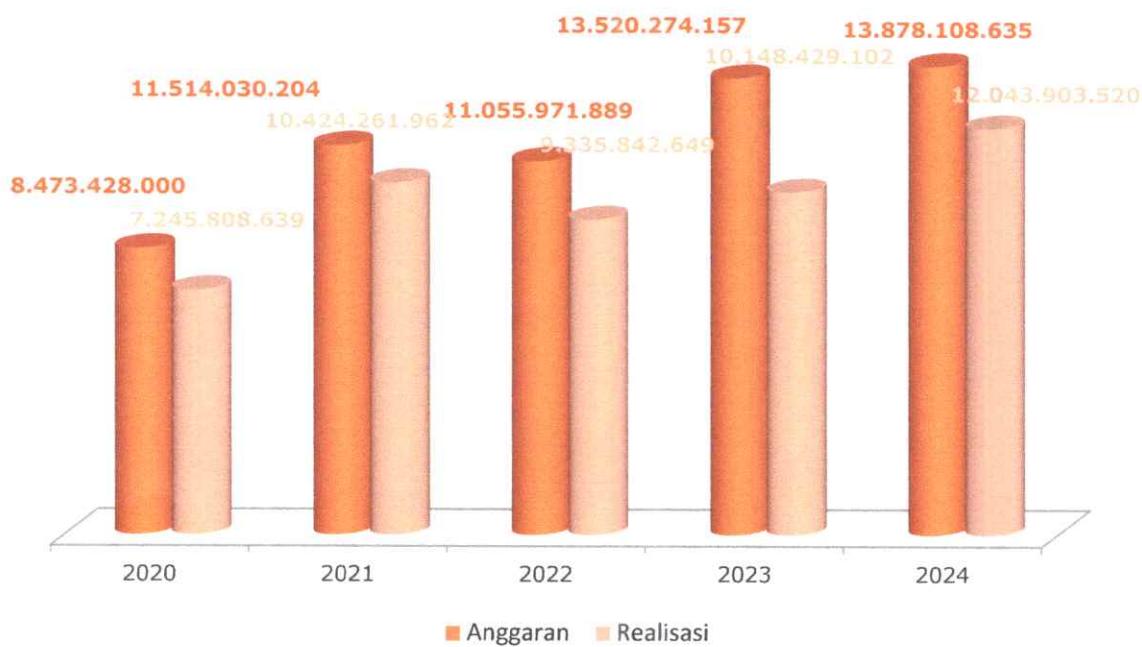


Gambar 2.8 Tren Pencapaian Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan  
Periode 2020 – 2024



Selain hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran dan program, kinerja pelayanan perangkat daerah juga dapat dilihat berdasarkan anggaran dan realisasi pendanaan dengan rincian sebagai berikut (Gambar 2.8) dibawah ini :

Gambar 2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende



Gambar di atas menunjukkan kinerja keuangan mengalami turun naik sejak tahun 2020 sampai dengan 2024. 85,51% di tahun 2020, 90,54 % di tahun 2021, 84,44% di tahun 2022, 75,06% di tahun 2023, 86,78% di tahun 2024. Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab kurang maksimalnya realisasi kinerja keuangan antara lain : ketidakpatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, kurangnya sumber daya manusia pengelola kegiatan dibidang teknis, kurangnya etos kerja pelaksana kegiatan baik di lapangan maupun di bidang teknis.

#### 2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam: a. menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di kabupaten/kota; dan b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat, dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan salah satu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar wajib dilaksanakan daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Ende sebagai pelaksana program kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan berupa : pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana; pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluhan keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga



berencana; pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi; pelaksanaan pelayanan keluarga berencana; pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan pembinaan kesetaraan keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pelayanan yang diberikan difokuskan kepada masyarakat, dan dalam memberikan pelayanan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Ende didukung oleh perangkat daerah, mitra perangkat daerah dan organisasi masyarakat antara lain :

1. Dinas Kesehatan
2. Puskesmas
3. Kepala Desa
4. Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD
5. Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK)
6. IBI
7. Organisasi/ LSM lainnya.

## 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada umumnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana) adalah :

1. Angka kelahiran total masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang.
2. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan.
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.



4. Rendahnya angka pemakaian kontrasepsi (CPR).
5. Tingginya angka unmeet need.
6. Tingginya Peserta KB yang putus pakai (Drop Out) disertai masih rendahnya kesertaan KB Pria.
7. Belum optimalnya cakupan dan kualitas pelayanan KB Pasca Persalinan (KB-PP).
8. Belum optimalnya pengetahuan orang tua tentang cara pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
9. Kurangnya pemahaman remaja dan keluarga tentang perencanaan/ penyiapan kehidupan berkeluarga.
10. Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga.
11. Belum maksimalnya strategi advokasi dan pengelolaan promosi/KIE melalui berbagai jenis media dalam meningkatkan pemahaman serta perubahan sikap dan perilaku dalam mendukung program Bangga Kencana.
12. Perlunya peningkatan kualitas data basis program Bangga Kencana.
13. Kompetensi ASN Dinas PPKB dalam aspek manajerial belum sepenuhnya mampu menghadapi perubahan lingkungan strategis.

#### 2.2.2. Isu Strategis

Berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi serta kebijakan program/ kegiatan pada Rencana Strategis Dinas PPPKB Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 antara lain :

1. Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan :
  - a. Bonus demografi, salah satu faktor penentu terciptanya struktur penduduk yang diinginkan adalah pengendalian angka kelahiran total/total fertility rate (TFR). Dalam jangka waktu yang relatif panjang, angka kelahiran ini menjadi salah



satu penentu struktur penduduk. Struktur penduduk seperti ini harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah dengan tetap menjaga TFR pada level tertentu.

- b. Pendekatan siklus hidup berbasis perencanaan hidup berkeluarga, dimulai dari gagasan perencanaan dari tahap pra berkeluarga (perencanaan kehidupan berkeluarga), merencanakan keinginan untuk memiliki anak termasuk jumlah anak yang dikehendaki, proses kehamilan yang merupakan fase yang juga penting dalam proses tumbuh kembang anak, 1.000 Hari Pertama Kehidupan (periode yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun), pendidikan anak usia dini (pra sekolah) sampai dengan usia sekolah, remaja dengan berbagai pendekatannya dalam penyiapan generasi bangsa yang berkualitas menuju usia produktif/bekerja serta perhatian terhadap kelanjutusiaan (seluruh tahapan kehidupan).
2. Isu strategis terkait pemenuhan layanan dasar :
  - a. Penggunaan kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Ratem/ mCPR) yang masih rendah, diperkirakan 2 (dua) penyebab utama menurunnya jumlah pengguna kontrasepsi modern, khususnya di kalangan kelompok usia produktif/pasangan usia muda adalah masih rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat dan tepercaya mengenai alat kontrasepsi (khususnya alat kontrasepsi modern).
  - b. Rendahnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Kurangnya sosialisasi dan edukasi kesehatan



reproduksi dapat memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan, diantaranya terkait penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang dapat mengakibatkan morbiditas bahkan mortalitas ibu. Angka kelahiran umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) juga masih relative tinggi, meskipun penurunnya cukup signifikan dari tahun ketahun. Kendala yang masih ada yaitu rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

- c. Kebutuhan ber-KB Pasangan Usia Subur yang belum terlayani (unmet need) dikategorikan masih tinggi.



### **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

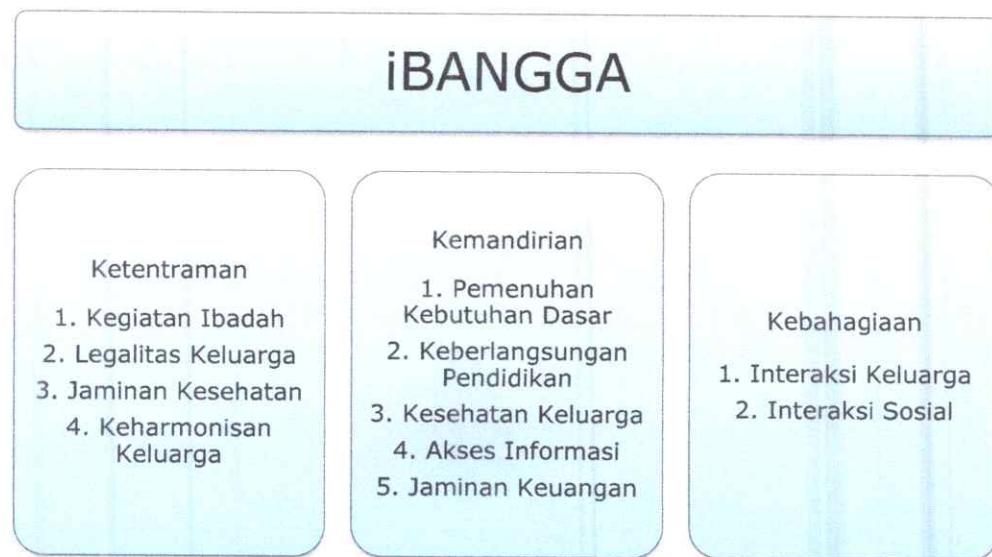
#### 3.1. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi atau hasil yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu atau periode rencana. Perumusan Tujuan dilakukan melalui cascading terhadap tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangan Menengah Daerah Kabupaten Ende 2025 – 2029.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029 adalah **"Terwujudnya Keluarga Berkualitas"** dengan indikator kinerjanya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Indeks Pembangunan Keluarga atau yang dikenal dengan singkatan iBangga merupakan ukuran program Pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Selain itu iBangga juga menggambarkan tentang peran dan fungsi keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

iBangga dibangun melalui kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 3.1 Konsep Indeks Pembangunan Keluarga



Adapun rumus perhitungan iBangga adalah sebagai berikut :

$$i\text{Bangga} = \frac{\text{Indeks Ketentraman} + \text{Indeks Kemandirian} + \text{Indeks Kebahagiaan}}{3}$$

Hasil capaian iBangga diterjemahkan dalam 3 klasifikasi yaitu :

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| iBangga di atas 70  | = Keluarga Tangguh     |
| iBangga 40 – 70     | = Keluarga Berekembang |
| iBangga di bawah 40 | = Keluarga Rentan      |

Target iBangga untuk tahun 2025 – 2030 sebagai berikut :



Gambar 3.2 Target Indeks Pembangunan Keluarga 2025 - 2030

### 3.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, dengan kata lain adalah ukuran yang lebih spesifik dari tujuan.

Sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 - 2029 adalah (1) **"Terciptanya Penduduk Tumbuh Seimbang"** dengan

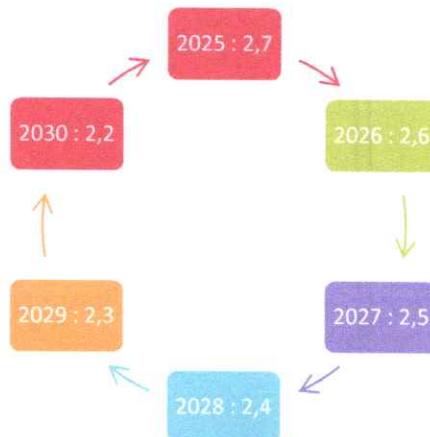


indikatornya adalah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) dan (2) “*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja*“ dengan indikatornya Nilai SAKIP .

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua Age-Specific Fertility Rate (ASFR) dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Selanjutnya, TFR dihitung berdasarkan rumus :

$$TFR = \frac{1}{1000} * 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$$

Target TFR untuk Tahun 2025 – 2030 adalah sebagai berikut :



Gambar 3.3 Target Total Fertility Rate/ TFR Tahun 2025 - 2030



Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah penilaian kinerja instansi pemerintah di Indonesia yang mencerminkan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan program. SAKIP adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Setiap instansi diwajibkan untuk mencatat dan melaporkan penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah produk akhir dari SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi.

Nilai SAKIP dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan skor yang diperoleh, yaitu :

AA (90-100)	Sangat memuaskan
A (80-89)	Memuaskan
BB (70-79)	Sangat Baik
B (60-69)	Baik
CC (50-59)	Cukup
C (30-49)	Kurang
D (0-29)	Sangat Kurang

Nilai SAKIP untuk Perangkat Daerah di Kabupaten Ende ditentukan oleh hasil evaluasi internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Ende. Target Nilai SAKIP untuk Tahun 2025 – 2023 adalah B untuk setiap tahunnya.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2029 beserta indikator kinerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel 3.1



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Terwujudnya Keluarga Berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	63	63,93	65,43	66,96	68,43	69,39	
		Terciptanya Penduduk Tumbuh Seimbang	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	

Berikut ini disajikan tabel penahapan rencana strategis yang menyajikan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.



**Tabel 3.2 Penahapan Rencana Strategis**  
**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
Penguatan Data dan Sistem Informasi keluarga (SIGA)	Penguatan Kapasitas Fasilitas Kesehatan yang melayani KB	Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak	Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi dan peningkatan pelayanan KB pasca persalinan	Evaluasi Pelaksanaan Program Bangga Kencana
Peningkatan Penyebarluasan Materi KIE Program Bangga Kencana	Peningkatan Kinerja Tenaga Penyuluhan KB/ PLKB dan penggerakan Kader IMP dan Sub IMP	Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja	Penguatan Lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB	Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk
	Penguatan Kapasitas Tenaga Medis Pelayanan KB	Advokasi Program Bangga Kencana Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		



### 3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende 5 (lima) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatkan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga, dengan strategi :
  - a. Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
  - b. Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
  - c. Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
  - d. Peningkatan kemandirian ekonomi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor.
  - e. Penguatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh.
  - f. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
2. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KB, dengan strategi :
  - a. Penguatan kapasitas faskes dan jaringan/jejaring yang melayani KB.
  - b. Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
  - c. Penguatan kapasitas tenaga medis pelayanan KB (dokter, bidan) serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
3. Menguatnya pemanfaatan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, dengan strategi :



- a. Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
  - b. Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.
4. Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana, dengan strategi :
    - a. Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana.
    - b. Peningkatan kinerja tenaga Penyuluhan KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader IMP/Sub IMP.
  5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan strategi :
    - a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.
    - b. Penguatan Perencanaan Program dan Anggaran.
    - c. Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur.
    - d. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Memperhatikan RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2029, sasaran strategis dan berbagai strategi operasional sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam Renstra Dinas PPKB Kabupaten Ende perlu dirumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan untuk periode 2025 – 2029. Secara garis besar terdapat 4 (empat) program yaitu 3 (tiga) program teknis dan 1 (satu) program pendukung :

- a. Program Pengendalian Penduduk, memiliki sasaran program Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk, dengan indikator Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific FertilityRate/ ASFR 15 -19)
- b. Program Keluarga Berencana, memiliki sasaran program Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan indikator Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) dan Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), memiliki sasaran program meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS), dengan indikator persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, memiliki sasaran program : meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah, dengan indikator persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien

Uraian selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1



Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
Bidang Urusan : Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
Program 1 : Pengendalian Penduduk														
Outcome 1 : Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indikator 1.1 : Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific FertilityRate/ ASFR 15 -19)	$ASFR_i = \frac{B_i}{F_m} \times K$ <p>B<sub>i</sub> = Jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur i tahun  F<sub>m</sub> = Jumlah penduduk wanita pada periangan tahun dalam kelompok umur i  K = Konstanta (=1000)</p>	27 per 1000 Kelahiran	25 per 1000 Kelahiran	500.000.000	23 per 1000 Kelahiran	509.800.000	21 per 1000 Kelahiran	524.074.400	20 per 1000 Kelahiran	543.989.227	19 per 1000 Kelahiran	561.396.882	
Kegiatan 1.1 : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk														
Output 1.1 : Terwujudnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk	Percentasi kebijakan Bangga Kencana yang dilaksanakan	Jumlah Kebijakan Bangga Kencana yang dilaksanakan x 100 Jumlah Kebijakan Bangga Kencana		100 %	100 %	80.000.000	100 %	105.000.000	100 %	105.000.000	100 %	111.000.000	100 %	115.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 1.1.1 : Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota													
Output 1.1.1 : Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota		1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000		
Sub Kegiatan 1.1.2 : Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 1.1.2 : Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	-			10 Sekolah	5.000.000						
Sub Kegiatan 1.1.3 : Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan.													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 1.1.3 : Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan.	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan.				36 Organisasi	10.000.000	27 Organisasi	10.000.000	28 Organisasi	10.000.000	29 Organisasi	10.000.000
Sub Kegiatan 1.1.4 : Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga													
Output 1.1.4 : Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga				3 Kali	5.000.000	4 Kali	5.000.000	3 Kali	5.000.000	3 Kali	5.000.000
Sub Kegiatan 1.1.5 : Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
Output 1.1.5 : Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8 Laporan	10 Laporan	80.000.000	10 Laporan	80.000.000	10 Laporan	80.000.000	10 Laporan	86.000.000	10 Laporan	90.000.000	
Kegiatan 1.2 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
Output 1.2 : Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan keluarga sebagai basis pengelolaan pembangunan kependudukan	Percentase Data dan Informasi Bangga Kencana yang dimanfaatkan	Data dan Informasi Bangga Kencana yang dimanfaatkan Data dan Informasi Bangga Kencana yang ada	x 100	100 %	100 %	420.000.000	100 %	404.800.000	100 %	419.074.400	100 %	432.989.227	100 %	446.396.882
Sub Kegiatan 1.2.1 : Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan														
Output 1.2.1 : Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan					1 Dokumen	5.000.000						



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 1.2.2 : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga													
Output 1.2.2 : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga				1 Laporan	5.000.000						
Sub Kegiatan 1.2.3 : Penyediaan Data dan Informasi Keluarga													
Output 1.2.3 : Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia.	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang tersedia.				1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
Sub Kegiatan 1.2.4 : Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga													
Output 1.2.4 : Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	265.000.000	1 Laporan	245.000.000	1 Laporan	255.000.000	1 Laporan	258.000.000	1 Laporan	265.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 1.2.5 : Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB													
Output 1.2.5 : Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	12 Dokumen	112.000.000,00	12 Dokumen	112.000.000,00	12 Dokumen	111.274.400	12 Dokumen	111.989.227	12 Dokumen	118.396.882
Sub Kegiatan 1.2.6 : Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain													
Output 1.2.6 : Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	45 RDK	45 RDK	22.500.000	25 RDK	12.300.000	25 RDK	12.300.000	48 RDK	22.500.000	50 RDK	22.500.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 1.2.7 : Pembinaan dan Pengawasan Pencacatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana													
Output 1.2.7 : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencacatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.500.000
Sub Kegiatan 1.2.8 : Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
Output 1.2.8 : Terlaksananya Penyusunan Profil Program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	
Program 2 : Pembinaan Keluarga Berencana (KB)														
Outcome 2 : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluaga Berencana (KB)	Indikator 2.1 : Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	Jumlah PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern Jumlah Pasangan Usia Subur	x 100	40,51 %	46,70 %	1.040.200.000	49,80 %	1.066.600.000	52,90 %	1.071.795.200	56,00 %	1.090.113.817	59,10 %	1.089.559.748
	Indikator 2.2 : Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi	Jumlah PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. Jumlah Pasangan Usia Subur	x 100	26,14 %	21,14 %	2.959.800.000	18,64 %	3.011.800.000	16,14 %	3.120.800.000	13,64 %	3.261.800.000	11,14 %	3.366.800.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Kegiatan 2.1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal													
Output 2.1 : Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Pada Program Bangga Kencana	Indikator 2.1.1 : Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	Jumlah Keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana x 100	44,00 %	44,30 %	1.829.000,00 0	44,60 %	1.881.000,00 00	44,90 %	1.980.000,000	45,20 %	2.091.000,00 00	45,50 %	2.206.000,000
	Indikator 2.1.2 : Persentase stakeholder yang mendukung Program Bangga Kencana	Jumlah Stakeholder yang mendukung Program Bangga Kencana x 100	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	
Sub Kegiatan 2.1.1 : Pengendalian Program KKBPK													
Output 2.1.1 : Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	5.000.000	21 Laporan	6.000.000	21 Laporan	5.000.000
Sub Kegiatan 2.1.2 : Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 2.1.2 : Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	21 Laporan	21 Laporan	1.048.000.00 0,00	21 Laporan	1.052.000.00 0,00	21 Laporan	1.150.000.000 ,00	21 Laporan	1.190.000.00 0,00	21 Laporan	1.253.000.000 ,00
Sub Kegiatan 2.1.3 : Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Racorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
Output 2.1.3 : Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Racorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Racorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Racorcum), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	183 Laporan	210 Laporan	320.000.000	210 Laporan	330.000.000	210 Laporan	330.000.000	210 Laporan	350.000.000	210 Laporan	360.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 2.1.4 : Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang													
Output 2.1.4 : Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	8 Dokumen	4 Dokumen	160.000.000	4 Dokumen	170.000.000	4 Dokumen	170.000.000	4 Dokumen	185.000.000	4 Dokumen	190.000.000
Sub Kegiatan 2.1.5 : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 2.1.5 : Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan		200 Kali	16.000.000	200 Kali	24.000.000	200 Kali	25.000.000	200 Kali	40.000.000	200 Kali	48.000.000
Sub Kegiatan 2.1.6 : Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja													
Output 2.1.6 : Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	60 Organisasi	70 Organisasi	280.000.000	75 Organisasi	300.000.000	80 Organisasi	300.000.000	85 Organisasi	320.000.000	90 Organisasi	350.000.000
Kegiatan 2.2 : Pelayanan Tenaga Penyuluhan KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 2.2 : Meningkatnya Kinerja Penyalur KB/ Petugas Lapangan KB	Cakupan PKB/ PLKB yang berkinerja baik	Jumlah PKB/ PLKB yang berkinerja baik (kinerja di atas 75%) x 100	60,00 %	61,50 %	1.130.800.000	62,00 %	1.130.800.00	62,50 %	1.140.800.000	63,00 %	1.170.800.00	63,50 %	1.160.800.000
Sub Kegiatan 2.2.1 : Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB		Jumlah PKB/ PLKB											
Output 2.2.1 : Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia		20 Unit	60.000.000	20 Unit	60.000.000	30 Unit	70.000.000	30 Unit	90.000.000	30 Unit	90.000.000
Sub Kegiatan 2.2.2 : Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)													
Output 2.2.2 : Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	834 Orang	834 Orang	1.000.800.00	834 Orang	1.000.800.00	834 Orang	1.000.800.000	834 Orang	1.000.800.00	834 Orang	1.000.800.000
Sub Kegiatan 2.2.3 : Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 2.2.3 : Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	278 Organisasi	278 Organisasi	50.000.000	278 Organisasi	50.000.000	278 Organisasi	50.000.000	278 Organisasi	60.000.000	278 Organisasi	50.000.000
Sub Kegiatan 2.2.4 : Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
Output 2.2.4 : Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	
Kegiatan 2.3 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota														
Output 2.3 : Terpenuhinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Peningkatan Pelayanan KB	Indikator 2.3.1 : Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	Jumlah alkon per mix kontrasepsi yang tersedia di Faskes dan gudang Alkon kab/kota Perkiraan Permintaan Masyarakat	x 100	67,31%	73,13%	835.200.000	76,31%	804.600.000	79,31%	809.795.200	82,31%	828.113.817	85,31%	827.559.748



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
	Indikator 2.3.2 : Persentase peserta KB aktif (PA) MKJP	Jumlah PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)  Jumlah PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern	x 100	41,51%	42,50%	43,00%		43,50%		44,00%		44,50%	
Sub Kegiatan 2.3.1 : Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jarungan dan Jejaringnya													
Output 2.3.1 : Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jarungan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jarungan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jarungan dan Jejaringnya	12 Laporan	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	60.000.000
Sub Kegiatan 2.3.2 : Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 2.3.2 : Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1650	Akesptor 560.200.000	1700	Akesptor 544.600.000	1725	Akesptor 534.795.200	1750	Akesptor 568.113.817	1775	Akesptor 552.559.748
Sub Kegiatan 2.3.3 : Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
Output 2.3.3 : Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alkon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB			1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000
Sub Kegiatan 2.3.4 : Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB													
Output 2.3.4 : Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000	5 Unit	100.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
Sub Kegiatan 2.3.5 : Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
Output 2.3.5 : Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	40.000.000	
Sub Kegiatan 2.3.6 : Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi														
Output 2.3.6 : Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	40 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	30.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 2.3.7 : Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB													
Output 2.3.7 : Terlaksananya Peningkatan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelolaan dan Petugas yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelolaan dan Petugas yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB		3 Orang	15.000.000			3 Orang	15.000.000			3 Orang	15.000.000
Kegiatan 2.4 : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 2.4 : Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Percentase Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berperan serta dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber KB x 100 Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ada	10%	10%	205.000.000	15%	262.000.000	15%	262.000.000	20%	262.000.000	20%	262.000.000
Sub Kegiatan 2.4.1 : Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB													
Output 2.4.1 : Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000
Sub Kegiatan 2.4.2 : Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas													
Output 2.4.2 : Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Dashat di Kampung KB	Jumlah Dashat di Kampung KB		27 Kelp	100.000.000	27 Kelp	120.000.000						



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
Sub Kegiatan 2.4.3 : Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
Output 2.4.3 : Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		25 Kampung	100.000.000	25 Kampung	137.000.000	25 Kampung	137.000.000	25 Kampung	137.000.000	25 Kampung	137.000.000	
Program 3 : Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)														
Outcome 3 : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Indikator 3.1 : Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga x 100 Jumlah Keluarga		18,79 %	25,00 %	2.400.000.000	30,00 %	2.447.040.00	40,00 %	2.515.557.120	45,00 %	2.611.148.290	50,00 %	2.694.705.035



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
Kegiatan 3.1 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga														
Output 3.1 : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan keluarga dan anggota keluarga serta peningkatan akses pelayanan KB bagi terwujudnya keluarga berkualitas	Cakupan anggota BKB,BKR,PIK-R,BKL dan UPPKA ber KB -R,BKL dan UPPKA ber KB	Jumlah anggota BKB,BKR,PIK-R,BKL dan UPPKA ber KB x 100 Jumlah Anggota BKB,BKR,PIK-R,BKL dan UPPKA		18,79 %	25 %	565.200.000	30 %	450.000.000	40 %	520.000.000	45 %	615.000.000	50 %	699.000.000
Sub Kegiatan 3.1.1 : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Ouput	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 3.1.1 : Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			21 Laporan	21.000.000	21 Laporan	21.000.000	21 Laporan	21.000.000	21 Laporan	21.000.000	21 Laporan	21.000.000
Sub Kegiatan 3.1.2 : Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)													
Output 3.1.2 : Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	14 Laporan	18 Laporan	9.000.000	18 Laporan	9.000.000	18 Laporan	9.000.000	18 Laporan	9.000.000	18 Laporan	9.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 3.1.3 : Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
Output 3.1.3 : Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	506 Laporan	206 Laporan	206.000.000	100 Laporan	100.000.000	140 Laporan	140.000.000	183 Laporan	183.000.000	299 Laporan	299.000.000
Sub Kegiatan 3.1.4 : Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 3.1.4 : Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	68 Unit	10 unit	130.000.000	10 unit	130.000.000	10 unit	130.000.000	10 unit	130.000.000	10 unit	130.000.000
Sub Kegiatan 3.1.5 : Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))													
Output 3.1.5 : Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader yang mengikuti Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksanaan/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))		200 Orang	30.000.000	200 Orang	30.000.000	200 Orang	30.000.000	200 Orang	30.000.000	200 Orang	30.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
	Pendapatan Keluarga Akseptor (UUPKA))												
Sub Kegiatan 3.1.6 : Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)													
Output 3.1.6 : Terlaksananya Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				100 Orang	50.000.000			100 Orang	50.000.000		
Sub Kegiatan 3.1.7 : Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UUPKA)													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 3.1.7 : Tersedianya Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UUPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan.	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UUPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan.	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UUPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan.		159 Kelp	159.200.000	100 Kelp	100.000.000	180 Kelp	180.000.000	182 Kelp	182.000.000	200 Kelp	200.000.000
Sub Kegiatan 3.1.9 : Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UUPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keuarga)													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 3.1.9 : Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keuarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keuarga) yang dibentuk	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keuarga) yang dibentuk	176 Kelp	142 Kelp	10.000.000	132 Kelp	10.000.000	122 Kelp	10.000.000	112 Kelp	10.000.000	101 Kelp	10.000.000
Kegiatan 3.2 : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 3.2 : Meningkatnya Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan kelompok kegiatan (poktan)	Cakupan organisasi kemasyarakatan/ mitra kerja dalam penggerakan dan pembinaan kelompok BKB, BKR, PIK-R, BKL dan UPPKA	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ mitra kerja x 100	38,00 %	54,00 %	1.834.800.000	62,00 %	1.877.040.000	68,00 %	1.875.557.120	74,00 %	1.876.148.290	80,00 %	1.875.705.035
Sub Kegiatan 3.2.1 : Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 3.2.1 : Terlaksananya Penguanan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguanan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguanan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)		50 Organisasi	32.240.000	50 Organisasi	30.757.120	50 Organisasi	31.348.290	50 Organisasi	30.905.035		
Sub Kegiatan 3.2.2 : Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja													
Output 3.2.2 : Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000		



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp	
Sub Kegiatan 3.2.3 : Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
Output 3.2.3 : Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita )	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Ca lon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahir an, Baduta/Balita )	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang dipantau Jumlah Keluarga Berisiko Stunting	x 100	69,00 %	77,50 %	834.000.000	85,00 %	834.000.000	85,00 %	834.000.000	90,00 %	834.000.000	95,00 %	834.000.000
Sub Kegiatan 3.2.4 : Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 3.2.4 : Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) yang didampingi	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita) yang didampingi	11910 Kel	13318 Kel	1.000.800.000	14607 Kel	1.000.800.000	15466 Kel	1.000.800.000	16325 Kel	1.000.800.000	17815 Kel	1.000.800.000
Kegiatan 3.3 : Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)													
Output 3.3 : Meningkatnya Pengetahuan Remaja tentang pentingnya PKBR	Cakupan PIK-R mendapatkan pembinaan dan sosialisasi PKBR	Jumlah PIK-R yang mendapatkan sosialisasi PKBR x 100 Jumlah PIK - R	18,79 %	25,00 %	-	30,00 %	120.000.000	40,00 %	120.000.000	45,00 %	120.000.000	50,00 %	120.000.000
Sub Kegiatan 3.3.1 : Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja													
Output 3.3.1 : Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Pembinaan Perencanaan Menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja			10 Kelp	10.000.000							



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 3.3.2 : Pembinaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan													
Output 3.3.2 : Tersedianya Pembinaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Jumlah Unit Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Jumlah Unit Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan			10 Unit	100.000.000							
Output 3.3.3 :Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya													
Output 3.3.3 : Terlaksananya Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana			10 Kali	10.000.000							
Program 4 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Outcome 4 : Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien	Indikator : Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Efektif dan Efisien	Jumlah Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	100 %	100 %	2.800.000.000	100 %	2.854.880.000	100 %	2.934.816.640	100 %	3.046.339.672	100 %	3.143.822.541
Kegiatan 4.1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Output 4.1 : Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	237.000.000	100%	237.000.000	100%	237.000.000	100%	237.000.000	100%	237.000.000
Sub Kegiatan 4.1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Output 4.1.1 : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 4.1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD													
Output 4.1.2 : Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000
Sub Kegiatan 4.1.3 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD													
Output 4.1.3 : Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000
Sub Kegiatan 4.1.4 : Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD													
Output 4.1.4 : Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000
Sub Kegiatan 4.1.5 : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 4.1.5 : Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000
Sub Kegiatan 4.1.6 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Output 4.1.6 : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Lap	1 Lap	7.000.000	1 Lap	7.000.000	1 Lap	7.000.000	1 Lap	7.000.000	1 Lap	7.000.000
Sub Kegiatan 4.1.7 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
Output 4.1.7 : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap	12 Lap	60.000.000	12 Lap	60.000.000	12 Lap	60.000.000	12 Lap	60.000.000	12 Lap	60.000.000
Kegiatan 4.2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 4.2 : Meningkatnya Pelayanan Admisisrasi Keuangan Perangkat Daerah	Percentase Pelayanan Admisitras Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	2.319.240.000	100%	2.370.120.000	100%	2.371.056.640	100%	2.465.579.672	100%	2.563.062.541
		Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan 4.2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
Output 4.2.1 : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	34 Orang	2.299.240.000	34 Orang	2.350.120.000	34 Orang	2.351.056.640	34 Orang	2.445.579.672	34 Orang	2.543.062.541
Sub Kegiatan 4.2.2 : Pelaksanaan Oenatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD													
Output 4.2.2 : Terlaksanaanya Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12 Dok	10.000.000	12 Dok	10.000.000	12 Dok	10.000.000	12 Dok	10.000.000	12 Dok	10.000.000
Sub Kegiatan 4.2.3 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 4.2.3 : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000
Sub Kegiatan 4.2.4 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD													
Output 4.2.4 : Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	5.000.000
Kegiatan 4.3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													
Output 4.3 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Barang Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah	100%	100%	27.000.000	100%	17.000.000	100%	22.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Daerah		Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Barang Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan 4.3.1 : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD													
Output 4.3.1 : Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	1 Dok	17.000.000	1 Dok	17.000.000	1 Dok	17.000.000	1 Dok	17.000.000	1 Dok	17.000.000
Sub Kegiatan 4.3.2 : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
Output 4.3.2 : Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000			1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
Kegiatan 4.4 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													
Output 4.4 : Meningkatnya Pelayanan Admisisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Admisitrasii Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	5.000.000	100%	39.000.000	100%	45.000.000	100%	55.000.000	100%	55.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 4.4.1 : Pengadaan Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
Output 4.4.1 : Tersedianya Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaiian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			34 Paket	34.000.000							
Sub Kegiatan 4.4.2 : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
Output 4.4.2 : Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000
Sub Kegiatan 4.4.3 : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
Output 4.4.3 : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						3 Orang	40.000.000	3 Orang	50.000.000	3 Orang	50.000.000
Kegiatan 4.5 : Administrasi Umum Perangkat Daerah													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 4.5 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	84.760.000	100%	34.760.000	100%	84.760.000	100%	84.760.000	100%	84.760.000
		Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan 4.5.1 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
Output 4.5.1 : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	50.000.000			1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000
Sub Kegiatan 4.5.2 : Fasilitasi Kunjungan Tamu													
Output 4.5.2 : Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
Sub Kegiatan 4.5.3 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
Output 4.5.3 : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	14.760.000	1 Laporan	14.760.000	1 Laporan	14.760.000	1 Laporan	14.760.000	1 Laporan	14.760.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Kegiatan 4.6 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
Output 4.6 : Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	30.000.000	100%	48.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000		
		Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											
Sub Kegiatan 4.6.1 : Pengadaan Mebel													
Output 4.6.1 : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan		1 Paket	30.000.000	1 Paket	48.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000		
Kegiatan 4.7 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Output 4.7 : Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000	100%	27.000.000
		Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											
Sub Kegiatan 4.7.1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat													



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Output 4.7.1 : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000
Sub Kegiatan 4.7.2 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
Output 4.7.2 : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	22.000.000
Kegiatan 4.8 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
Output 4.8 : Meningkatnya Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Capaian Kinerja Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Sub Kegiatan Pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000



Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Formula Indikator	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Rp
Sub Kegiatan 4.8.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Output 4.8.1 : Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	5 Unit	5 Unit	80.000.000	5 Unit	80.000.000	5 Unit	80.000.000	5 Unit	80.000.000	5 Unit	80.000.000
Sub Kegiatan 4.7.2 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
Output 4.7.2 : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000



Ende Sehat merupakan salah satu program prioritas pembangunan daerah dari dua belas program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025-2029. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende dalam melaksanakan program/ kegiatannya mendukung pencapaian program prioritas Ende Sehat. Pelaksanaan program/ kegiatan yang mendukung program prioritas Ende Sehat selengkapnya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keterangan
1	Ende Sehat (Membangun investasi masyarakat yang sehat melalui Optimalisasi Pelayanan dan Sadar Kesehatan)	Investasi Masyarakat Sehat	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	
		Optimalisasi Pelayanan Kesehatan	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jarungan dan Jejaringnya	
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
		Gerakan Sadar Kesehatan	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	



#### 4.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ditentukan melalui dua indikator kinerja utama yang akan dicapai, seperti tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal Renstra (2024)	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indeks Penbangunan Keluarga (i Bangga)	62,42	63	63,93	65,43	66,96	68,43	69,93
Total Fertility Rate (TFR)	2,86	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2
Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	B	B

#### 4.3. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

Selain indikator kinerja utama, penyelenggaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2025 – 2029 juga diukur melalui indikator kinerja kunci, sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Awal Renstra (2024)	Target Kinerja					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific FertilityRate/ ASFR 15 -19)	27 per 1000 Kelahiran	26 per 1000 Kelahiran	25 per 1000 Kelahiran	23 per 1000 Kelahiran	21 per 1000 Kelahiran	20 per 1000 Kelahiran	19 per 1000 Kelahiran
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	40,51%		46,70%	49,80%	52,90%	56%	59,1%
Persentase Kenutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi	26,14%		21,14%	18,64%	16,14%	13,64%	11,14%
Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	18,79%		25%	30%	40%	45%	50%



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan. Secara umum, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan kontribusi secara langsung dan terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025- 2029.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende Tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam pengelolaan Program Bangga Kencana yang lebih efektif dan efisien, dengan memperhatikan kerangka waktu dalam pencapaian sasaran program/kegiatan, baik selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maupun di setiap tahunnya (program/kegiatan jangka pendek/ tahunan). Pembangunan Program Bangga Kencana diharapkan mampu mengikuti perkembangan isu dan lingkungan strategis sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan untuk pencapaian tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Akhirnya, segala upaya dalam implementasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang disusun di dalam dokumen Renstra ini diharapkan mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ende. Segala permasalahan yang ada di dalam implementasi Program Bangga Kencana ke depan merupakan tantangan bersama yang harus dihadapi melalui berbagai strategi yang telah disiapkan.



Paraf Koordinasi	
Kepala DPPKB	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kestra	
Kepala DPPKB	

